



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF AGUNG SUSAPTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 776567

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 890 m2/350 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 75.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 56.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 481.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 481.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SOLEKHAH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM
3. NHK : 760670

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 470.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, WARISAN Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 23.500.000

1. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER SHORT/KF42 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.562.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 506.262.000

III. HUTANG Rp. 259.722.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 246.540.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUMINAR BUDI SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 157438

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 1015 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 192.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, SUZUKI WAGON R Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.316.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.384.986

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 696.200.986

III. HUTANG Rp. 74.576.900

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 621.624.086

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITO SEJATI
2. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
3. NHK : 778669

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/126 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 69.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TARUNA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.098.370

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 443.598.370

III. HUTANG Rp. 47.109.204

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 396.489.166

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.